

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, Indonesia telah berhasil memenuhi mandat regional ASEAN secara administratif dan teknis melalui penyelarasan kebijakan nasional P4GN dengan kerangka strategis ASEAN Work Plan 2016–2025. Implementasi ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun ketahanan komunitas melalui program pencegahan berbasis desa dan perluasan akses fasilitas rehabilitasi. Namun, belum ada keseimbangan ideal antara strategi pengurangan pasokan dan pengurangan permintaan. Dalam dimensi pengurangan pasokan, kebijakan negara masih berfokus pada aspek penegakan hukum yang represif terhadap objek fisik, seperti memburu bandar, memutus jalur distribusi sindikat internasional, dan menyita narkoba. Akibatnya, efektivitas di lapangan masih bersifat parsial. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kelangkaan barang di pasar, namun sering kali belum menyentuh akar permasalahan mengapa pasar tersebut tetap eksis dan terus beregenerasi.

Ketidakseimbangan ini terlihat ketika upaya pemberantasan barang dan bandar tidak berjalan selaras dengan pilar pengurangan permintaan (demand reduction), yang secara filosofis berfokus pada sisi manusia atau pengguna sebagai konsumen utama. Pengurangan permintaan menuntut adanya penguatan pada dimensi kesehatan publik dan edukasi untuk menghilangkan ketergantungan serta keinginan masyarakat dalam mengonsumsi zat terlarang. Selama pasar atau

"permintaan" dari para pengguna ini masih tinggi, sindikat akan selalu menemukan celah untuk memasukkan pasokan baru meskipun pengawasan perbatasan diperketat. Di sinilah peran organisasi masyarakat sipil menjadi sangat vital sebagai mitra strategis atau bridging actor yang mengisi celah tata kelola dengan menyediakan layanan rehabilitasi yang lebih humanis dan inklusif. Stabilitas keamanan kawasan hanya dapat dicapai jika Indonesia mampu menelaraskan ketegasan hukum terhadap pelaku kejahatan di sisi pasokan dengan perlindungan hak asasi manusia serta pemulihan kesehatan bagi para korban di sisi permintaan secara seimbang dan berkelanjutan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran praktis yang ditujukan kepada pemerintah melalui BNN dan instansi terkait untuk memperkuat efektivitas penanggulangan narkoba di masa depan. Pemerintah perlu melakukan recalibrasi strategi secara mendasar dengan memberikan porsi sumber daya yang lebih proporsional antara penegakan hukum terhadap jaringan sindikat dan upaya rehabilitasi bagi para pengguna. Penguatan kapasitas institusi lokal serta pemberian dukungan kebijakan dan pendanaan yang lebih sistematis terhadap organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis negara menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Kolaborasi ini sangat krusial guna menjangkau kelompok marginal atau hidden population yang selama ini memiliki hambatan dalam mengakses layanan formal negara akibat stigma sosial maupun trauma kriminalisasi. Selain itu, optimalisasi mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) harus terus didorong agar proses hukum bagi pengguna murni dapat sepenuhnya

diarahkan pada pemulihan kesehatan melalui skema Double Track System, yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam mengurangi beban krisis overcrowding pada sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh transformasi digital dan teknologi informasi terhadap evolusi kejahatan narkoba transnasional. Fokus penelitian dapat diarahkan pada penggunaan dark web dan mata uang kripto yang memungkinkan modus operandi sindikat menjadi kian anonim dan sulit dilacak melalui metode konvensional. Diperlukan juga studi komparatif yang lebih luas dengan negara anggota ASEAN lainnya untuk memetakan praktik terbaik (best practices) dalam menangani ancaman zat kimia baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang sering kali mendahului kesiapan regulasi domestik. Selain itu, evaluasi jangka panjang mengenai keberlanjutan program pencegahan berbasis komunitas, seperti Desa Bersinar, menjadi poin krusial yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi ketahanan sosial di tingkat akar rumput dapat berjalan secara mandiri dan tetap efektif dalam jangka panjang tanpa bergantung sepenuhnya pada intervensi maupun anggaran dari pemerintah pusat.